

PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI SEKOLAH DI DESA HULU SAMPANAHAN

Selamat Riadi^{1*}, Nasruddin Nasruddin¹, Syahlan Mattiro², Faisal Amin¹, M. Riduan¹

¹ Program Studi Geografi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Lambung Mangkurat

² Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Lambung Mangkurat

*Korespondensi : selamatriadi@ulm.ac.id

ABSTRACT

Remote Indigenous Communities (KAT) in Hulu Sampanahan Village face serious barriers in accessing formal education due to geographic isolation, economic limitations, poor infrastructure, and strong local cultural values. This community service program aimed to increase educational awareness while identifying factors that hinder school participation among KAT in Hulu Sampanahan. The program was carried out through participatory educational outreach and socialization using a Participatory Action Research (PAR) approach, involving village officials, community leaders, and residents. The findings revealed that low school participation is mainly caused by the long distance to secondary schools (33–44 km), severely damaged road conditions, the absence of middle and high schools within the village, and low parental awareness (only about 30% encourage their children to continue to junior high school, and less than 10% aspire for higher education). In addition, more than 70% of children are involved in household and subsistence work. Through the educational sessions attended by 35 households, with 63% actively participating in discussions, the community gained new awareness regarding educational rights, the importance of secondary and higher education, as well as scholarship opportunities accessible to their children. As an impact, the program successfully built initial community awareness of the strategic value of education, while also identifying priority needs such as the establishment of satellite schools, the provision of school transportation, and sustained multi-stakeholder support. Thus, participatory and context-based educational empowerment has proven to be an effective initial step in fostering social transformation in remote Indigenous communities.

Keywords: Empowerment; education; remote indigenous communities; participatory action research

ABSTRAK

Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Desa Hulu Sampanahan menghadapi hambatan serius dalam mengakses pendidikan formal akibat keterpencilan geografis, keterbatasan ekonomi, buruknya infrastruktur, dan nilai-nilai budaya lokal. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pendidikan sekaligus mengidentifikasi faktor penghambat partisipasi sekolah

RIWAYAT ARTIKEL

Diserahkan : 27/07/2025

Diterima : 09/03/2026

Dipublikasikan : 04/04/2026

pada Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Desa Hulu Sampanahan. Kegiatan dilaksanakan melalui edukasi dan sosialisasi berbasis partisipatif dengan pendekatan Participatory Action Research (PAR), melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan warga. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi sekolah disebabkan oleh jarak ke sekolah menengah yang sangat jauh (33–44 km), kondisi jalan rusak berat, ketiadaan layanan pendidikan menengah di desa, rendahnya kesadaran orang tua (hanya sekitar 30% mendorong anak hingga SMP, dan kurang dari 10% hingga perguruan tinggi), serta keterlibatan lebih dari 70% anak dalam pekerjaan rumah tangga dan aktivitas ekonomi keluarga. Melalui kegiatan edukasi yang diikuti oleh 35 kepala keluarga dengan tingkat partisipasi aktif 63%, masyarakat memperoleh pemahaman baru mengenai hak pendidikan, pentingnya pendidikan menengah dan tinggi, serta peluang beasiswa yang dapat diakses anak-anak mereka. Dampaknya, kegiatan ini berhasil membangun kesadaran awal masyarakat terhadap nilai strategis pendidikan, sekaligus mengidentifikasi kebutuhan prioritas berupa sekolah filial, transportasi pendidikan, dan dukungan multi-stakeholder yang berkelanjutan. Dengan demikian, pemberdayaan pendidikan berbasis partisipasi terbukti menjadi langkah awal yang efektif dalam mendorong transformasi sosial di komunitas adat terpencil.

Kata Kunci: Pemberdayaan; pendidikan; komunitas adat terpencil; *participatory action research*

PENDAHULUAN

Komunitas Adat Terpencil (KAT) merupakan kelompok masyarakat yang berada di wilayah terpencil, sulit dijangkau, dan terisolasi secara geografis. Komunitas ini umumnya menggantungkan hidup pada sumber daya alam, memegang teguh nilai-nilai tradisional, dan menghadapi hambatan serius dalam mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan aksesibilitas (Sujarwani et al., 2018). Keterbatasan tersebut berdampak pada rendahnya kualitas hidup dan kesejahteraan komunitas adat terpencil (Quilty et al., 2022; Sangha et al., 2020). Sehingga perlu adanya pemberdayaan terhadap komunitas adat terpencil, sebagai sebuah upaya untuk mendorong kesejahteraan, kemandirian, dan meningkatnya kualitas hidup.

Pemberdayaan masyarakat sebagai respon dari kegagalan pendekatan pembangunan (Prasetyo et al., 2025), bukan bersifat selamanya, tetapi dilakukan sampai masyarakat tersebut mampu untuk mandiri, meskipun perlu diawasi dan dipantau agar kemandiriannya tidak kembali terpuruk. Artinya, dapat dikatakan bahwa pemberdayaan dilakukan melalui proses belajar hingga mencapai status

mandiri. Agar tidak terjadi kemunduran dan tetap berdaya, perlu dilakukan pemeliharaan semangat (Hikmawati, 2022; Susanto et al., 2024).

Desa Hulu Sampanahan merupakan salah satu desa di Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru yang mendiami wilayah dengan akses terbatas. Masyarakat di Desa Hulu Sampanahan, memiliki keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan hidup secara ekonomi sehingga membuat mereka tidak berkembang. Masyarakat Desa Hulu Sampanahan juga bersifat homogen, karena seluruh penduduknya (100%) merupakan suku Dayak Meratus. Kesamaan etnis ini menjadikan mereka memiliki identitas social dan budaya yang seragam, baik dalam bahasa, adat istiadat, maupun sistem kekerabatan. Homogenitas tersebut juga tercermin dalam kesamaan pola mata pencaharian, Tingkat Pendidikan, serta cara pandang terhadap kehidupan sosial dan ekonomi.

Berdasarkan hasil analisis spasial menggunakan pendekatan *network* analisis, ditemukan bahwa bahwa rentang kendali yang tinggi pada akses layanan Pendidikan, Dimana menuju SMP sejauh 33,23 km, dan SMA sejauh 37,03 km. Pemahaman masyarakat Desa Hulu Sampanahan terhadap pentingnya

Pendidikan juga sangat minim. Hal ini ditandai dengan rendahnya Angka Melek Huruf (AMH) yakni sebesar 83,94%. Lebih lanjut berdasarkan data menunjukkan bahwa, 16% tidak pernah sekolah, 42% tidak tamat SD, 13% SD/Sederajat, 1% SLPT/Sederajat, dan 3% SLPA/Sederajat (BPS, 2023).

Dari permasalahan yang dihadapi masyarakat Desa Hulu Sampanahan dipandang perlu dilakukan pemberdayaan sebagaimana sesuai dengan Perpres Nomor 186 Tahun 2014 tentang perlindungan hak-hak warga negara untuk memenuhi kebutuhan dasar serta meningkatkan kemandirian Komunitas Adat Terpencil (KAT). Selain itu juga berdasarkan Amanah negara terhadap pemerintah daerah agar memprioritaskan masyarakat dalam Komunitas Adat Terpencil (KAT) memprioritaskan pemberdayaan baik dari segi pendidikan, kesehatan, ekonomi maupun aksesibilitas yang sesuai dengan Permendagri Nomor 7 Tahun. 2007 tentang kader pemberdayaan Masyarakat.

METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diawali dengan observasi awal melalui wawancara dengan Kepala Desa sebagai representasi pemerintahan desa yang memahami kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Setelah itu dilakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengidentifikasi permasalahan utama yang dihadapi masyarakat. Berdasarkan hasil temuan tersebut, tim pengabdian kemudian menyusun topik permasalahan yang menjadi fokus program, sekaligus merancang langkah-langkah penyelesaian yang relevan. Secara umum, timeline kegiatan meliputi:

1. tahap persiapan dan koordinasi dengan pihak desa,
2. tahap observasi awal dan pengumpulan data,
3. tahap perumusan permasalahan dan perencanaan program,
4. tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian sesuai program yang telah disusun, dan

5. tahap evaluasi serta tindak lanjut untuk keberlanjutan program.

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan adalah edukasi dan sosialisasi berbasis partisipatif serta *Participatory Action Research* (PAR). Edukasi dan sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman langsung kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, hak anak atas pendidikan, serta peluang beasiswa yang tersedia. Sementara itu, pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) digunakan untuk menggali secara partisipatif permasalahan utama yang dihadapi masyarakat dalam partisipasi sekolah, sekaligus melibatkan mereka dalam proses analisis dan perumusan kebutuhan strategis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Edukasi dan Sosialisasi

Kegiatan edukasi dan sosialisasi di Desa Hulu Sampanahan merupakan langkah awal pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) melalui pendekatan partisipatif. Edukasi dilakukan dalam bentuk penyuluhan yang berfokus pada pentingnya pendidikan formal, hak anak atas pendidikan, dan peluang beasiswa.

Sebanyak 35 kepala keluarga hadir dalam kegiatan ini. Kehadiran mereka merupakan hasil undangan yang disampaikan secara umum kepada perangkat desa, sehingga peserta yang hadir mempresentasikan masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) di desa tersebut. Kegiatan edukasi dan sosialisasi dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Edukasi dan Sosialisasi
(Sumber: Dokumentasi Kegiatan, 2023)

Pada sesi pertama, setelah pembukaan oleh kepala desa yang diwakili oleh perangkat desa yakni Kasi Pemerintahan, narasumber pertama yaitu Dr. Nasruddin, S.Pd.,M.Pd. menyampaikan pentingnya pendidikan dalam meningkatkan taraf hidup dan sebagai hak dasar setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 dan berbagai regulasi turunannya. Peserta juga diberi motivasi tentang nilai-nilai pendidikan sebagai sarana memperbaiki masa depan generasi muda dan mengangkat derajat sosial-ekonomi keluarga.

Sesi kedua, dilanjutkan dengan pemberian materi oleh Selamat Riadi, S.Pd.,M.Pd tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak generasi penerus bangsa. Setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan, tidak terkecuali bagi anak yang berada di pelosok desa atau pedalaman. Selain itu disampaikan informasi bahwa anak yang berada pelosok desa atau pedalaman menempuh pendidikan yang layak merupakan hak setiap warga negara. Terakhir disampaikan terkait berbagai macam beasiswa yang bisa didapatkan dan disediakan pemerintah pusat maupun daerah, khususnya untuk anak yang kurang mampu.

Peserta mengikuti kegiatan dengan antusiasme yang tinggi, yang tercermin dari partisipasi aktif mereka selama kegiatan berlangsung. Dari 35 kepala keluarga yang hadir, seluruhnya mengikuti kegiatan hingga selesai tanpa ada yang meninggalkan forum lebih awal (100% kehadiran penuh). Sebanyak 22 orang (sekitar 63%) terlibat langsung dalam diskusi dengan mengajukan pertanyaan atau menyampaikan keluhan terkait kendala pendidikan anak mereka. Selama sesi tanya jawab, tercatat lebih dari 15 pertanyaan dan tanggapan yang muncul, menunjukkan intensitas interaksi antara peserta dan pemateri. Bahkan, beberapa peserta tampak mencatat penjelasan pemateri untuk dijadikan bahan diskusi lanjutan di tingkat keluarga maupun komunitas.

Secara teoritis, kegiatan ini sejalan dengan pendekatan *empowerment* oleh (Zimmerman, 1995), yang menekankan bahwa pemberdayaan

mencakup aspek psikologis (kesadaran diri), organisasi (dukungan kelembagaan), dan komunitas (partisipasi kolektif). Proses dialog dan partisipasi yang dilakukan dalam kegiatan edukasi dan sosialisasi mencerminkan prinsip-prinsip pendidikan kritis (Freire & Ramos, 2009), dimana masyarakat menjadi aktor reflektif yang menyadari realitas sosialnya dan terdorong untuk melakukan transformasi.

Selain itu, studi (Hikmawati, 2022; Joseph, 2020), memperkuat bahwa penyuluhan yang dilakukan secara kontekstual dan melibatkan warga dalam pengambilan keputusan efektif untuk membangun komitmen bersama. Hal ini juga memperkuat penelitian (Sangha et al., 2020), yang menunjukkan bahwa program pemberdayaan di komunitas adat hanya akan berhasil jika disertai dengan pendekatan holistik yang mencakup aspek edukasi.

2. Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan hasil diskusi kelompok terfokus dan pemetaan partisipatif yang dilakukan selama kegiatan sosialisasi mengungkapkan lima permasalahan utama yang menghambat partisipasi sekolah formal Komunitas Adat terpencil (KAT) di Desa Hulu Sampanahan. Kelima isu ini merefleksikan keterkaitan antara hambatan structural, geografis, dan kulturasi khas. Selanjutnya diuraikan berdasarkan pengamatan empiris yang kemudian dianalisis dengan pendekatan teoritik.

a. Jarak Tempuh Ke Sekolah Menengah Sangat Jauh

Hasil pengukuran spasial menunjukkan bahwa akses menuju sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) memerlukan jarak tempuh rata-rata 33 hingga 44 km dari permukiman warga. Jarak ke SMPN 1 Hampang mencapai 33,23 km, SMPN 2 Hampang 44,37 km, dan ke SMAN Hampang 33,50 km (lihat Tabel 1). Kondisi ini menimbulkan rentang kendali layanan Pendidikan yang sangat tinggi, melampaui standar ideal aksesibilitas pendidikan yang

direkomendasikan oleh UNESCO, yaitu maksimal 6 km untuk sekolah menengah pertama di wilayah pedesaan. Ketimpangan akses seperti ini tidak hanya berdampak pada kuantitas partisipasi sekolah, tetapi juga memengaruhi kualitas pengalaman belajar siswa, karena tingginya risiko kelelahan, absensi, dan putus sekolah.

Tabel 1. Jarak (km) Akses ke SMPN 1, SMPN 2, dan SMAN Hampang

No	Jenjang>Nama Sekolah	Jarak Rata-Rata (km)
1	SMPN 1 Hampang	33,23
2	SMPN 2 Hampang	44,37
3	SMAN Hampang	33,50

(Sumber: Olahan Peneliti, 2023)

Jika dilihat dari perspektif teori ketimpangan spasial (Massey & Denton, 2012), keterpencilan geografis dan tidak meratanya persebaran layanan pendidikan menjadi penyebab utama terjadinya eksklusi sosial spasial. Anak-anak dari keluarga miskin di wilayah terpencil cenderung mengalami hambatan fisik dan struktural yang mengarah pada reproduksi ketimpangan antar generasi.

Hal ini sejalan dengan penelitian (Mingat, 2020), bahwa jarak dan waktu tempuh menjadi penentu utama bagi rumah tangga dalam memutuskan apakah anak akan tetap bersekolah atau tidak. Diperkuat penelitian (Yadav & Vashishtha, 2024), bahwa keberadaan sekolah tidak cukup, yang diperlukan adalah akses yang layak, aman dan manusiawi.

Berdasarkan perspektif tersebut, menunjukkan bahwa permasalahan akses di Desa Hulu Sampanahan bukan sekedar jarak, tetapi mencerminkan ketimpangan sistemik yang menuntut respon kebijakan yang berpihak, inklusif dan berbasis keadilan spasial. Artinya, intervensi tidak cukup berhenti pada pembangunan sekolah, tetapi harus mencakup aksesibilitas, pengadaan asrama komunitas, atau pengembangan model sekolah filial yang adaptif terhadap medan geografis dan budaya lokal.

b. Kondisi Jalan Rusak Berat

Aksesibilitas menuju fasilitas pendidikan di Desa Hulu Sampanahan tidak hanya terhambat oleh jarak yang jauh, tetapi juga diperparah oleh kondisi jalan yang rusak berat. Jalur transportasi utama menuju sekolah menengah belum beraspal, rusak berat, dan sangat sulit dilalui terutama saat musim hujan (lihat Gambar 2).



Gambar 2. Kondisi Jalan

(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2023)

Dari perspektif teori, permasalahan ini mencerminkan bentuk nyata dari ketimpangan infrastruktur sosial (*social infrastructure inequality*), sebagaimana dijelaskan oleh (Gansauer et al., 2024; Tomaney et al., 2024), bahwa di mana wilayah marginal dan komunitas adat cenderung menjadi "ruang tertinggal" (*left-behind spaces*) dalam perencanaan pembangunan karena kriteria efisiensi ekonomi sering mengabaikan prinsip keadilan spasial. Infrastruktur yang buruk menjadi indikator material dari ketimpangan struktural yang memperdalam kemiskinan dan eksklusi pendidikan.

Dipertegas Quilty et al., (2022) bahwa komunitas adat di wilayah terpencil akan terus terjebak dalam siklus ketertinggalan apabila tidak disertai dengan investasi negara yang berkelanjutan dalam infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, jaringan digital, dan sekolah. Sejalan dengan itu, Zada et al., (2023), menemukan bahwa ketidakhadiran infrastruktur jalan berimplikasi serius terhadap pendidikan, khususnya bagi anak-anak perempuan yang dua kali lebih mungkin putus sekolah dibandingkan anak laki-laki karena

faktor keamanan dan beban kerja domestik tambahan. Kondisi serupa juga terlihat di lokus kegiatan, di mana akses menuju desa hanya tersedia melalui jalur darat dengan kondisi jalan yang rusak parah dan sulit dilalui, terutama pada musim hujan. Akibatnya, sebagian anak, terutama Perempuan mengalami hambatan lebih besar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah dan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan infrastruktur di Desa Hulu Sampanahan bukan hanya persoalan akses umum, tetapi juga berdampak berbeda terhadap anak laki-laki dan perempuan, sehingga memperkuat kerentanan kelompok marginal dalam komunitas adat.

c. Ketiadaan Layanan Pendidikan Menengah di Desa

Desa Hulu Sampanahan saat ini hanya memiliki satu satuan pendidikan formal, yaitu SD Hulu Sampanahan, yang berstatus sebagai filial dari SDN Limbur (lihat Gambar 3). Sekolah ini dikelola oleh dua guru bantu dengan fasilitas sangat terbatas baik dari sisi sarana belajar, kondisi bangunan, maupun tenaga pengajar. Tidak terdapat fasilitas pendidikan menengah (SMP maupun SMA) dalam radius yang terjangkau oleh anak-anak setempat. Untuk menempuh jenjang berikutnya, siswa harus berpindah ke desa lain dengan jarak tempuh lebih dari 30 km, yang tidak realistis dilakukan setiap hari mengingat kondisi medan dan infrastruktur jalan yang rusak parah.



Gambar 3. Gedung Sekolah Dasar Desa Hulu Sampanahan
(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2023)

Kondisi sekolah yang sederhana dan tidak representatif mencerminkan minimnya investasi negara dalam pemenuhan hak Pendidikan anak-anak wilayah terpencil. Situasi ini menandakan adanya ketimpangan structural dalam distribusi layanan pendidikan, yang telah menjadi sorotan berbagai studi tentang pendidikan di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

Menurut teori keadilan spasial dalam Pendidikan (Kearns et al., 2009; Soja, 2013), menunjukkan bahwa tersedianya sekolah menengah di dekan permukiman bukan hanya soal geografis, melainkan juga soal ketimpangan politik dalam penataan ruang layanan publik. Dipertegas (Sumari et al., 2019) menyatakan bahwa ketiadaan sekolah menengah dalam radius 5–10 km secara langsung menurunkan angka transisi SD ke SMP hingga 40–60%, terutama di kawasan adat dan pegunungan. Hal ini diperburuk jika sekolah dasar yang tersedia hanya berstatus filial dan tidak memiliki jaminan kelanjutan jenjang pendidikan bagi siswanya.

d. Rendahnya Kesadaran Orang tua terhadap Pendidikan Formal

Masyarakat Desa Hulu Sampanahan mengungkapkan bahwa mereka masih kurang memiliki kesadaran terhadap pentingnya pendidikan menengah dan tinggi. Sebagian besar orang tua hanya mendorong anak-anak mereka bersekolah hingga jenjang dasar, sementara yang melanjutkan ke jenjang SMP atau SMA jumlahnya sangat terbatas. Berdasarkan keterangan kepala desa, diperkirakan kurang dari 30% orang tua yang berupaya menyekolahkan anaknya hingga pendidikan menengah, dan hanya sebagian kecil (sekitar 5–10%) yang memiliki harapan anaknya dapat menempuh pendidikan tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan belum sepenuhnya dipandang sebagai sarana transformasi sosial dan pemberdayaan diri, melainkan dianggap sebagai kebutuhan sekunder yang sulit dijangkau. Hal ini sejalan dengan pendapat Fazzio et al. (2021) yang menyatakan bahwa rendahnya literasi sosial di

kalangan masyarakat miskin dan terpencil bukan semata-mata akibat keterbatasan informasi, melainkan karena adanya pandangan bahwa pendidikan adalah sesuatu yang asing dan tidak mereka butuhkan.

Hal ini dipertegas penelitian Abdullah et al., (2023), bahwa pemahaman orang tua terhadap Pendidikan sangat dipengaruhi oleh relasi social local, tokoh adat, dan pengalaman antar generasi. Lebih lanjut, dikatakan bahwa, ketika generasi sebelumnya tidak menyelesaikan pendidikan atau tidak memperoleh manfaat langsung dari pendidikan formal, maka persepsi mereka terhadap sekolah cenderung negatif.

e. Anak-anak lebih Memilih Membantu Orang Tua Bekerja

Salah satu hambatan utama terhadap partisipasi pendidikan formal di Desa Hulu Sampanahan adalah keterlibatan aktif anak-anak dalam pekerjaan rumah tangga dan aktivitas ekonomi keluarga sejak usia dini. Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa, diperkirakan lebih dari 70% anak terlibat membantu orang tua di kebun, ladang, atau mencari hasil hutan. Keterlibatan ini dianggap sebagai bentuk kontribusi positif terhadap kesejahteraan keluarga, sehingga pendidikan sering kali menjadi prioritas kedua. Dari segi gender, anak laki-laki umumnya lebih banyak diarahkan untuk bekerja di ladang atau mencari hasil hutan, sedangkan anak perempuan cenderung lebih sering membantu pekerjaan domestik dan menjaga adik-adik di rumah. Meskipun proporsi keterlibatan relatif sama, beban kerja anak perempuan biasanya lebih berat karena harus membagi waktu antara membantu pekerjaan rumah tangga dan sesekali ikut ke ladang. Kondisi ini berdampak pada lebih tingginya risiko anak perempuan mengalami putus sekolah dibandingkan anak laki-laki.

Praktik ini tidak lepas dari sistem nilai lokal yang menjunjung tinggi gotong royong keluarga, solidaritas generasi, dan peran anak sebagai bagian dari unit ekonomi rumah tangga. Dalam konteks komunitas adat, peran

sosial anak tidak semata-mata dilihat dari usianya, tetapi dari fungsi produktif yang mereka bisa lakukan dalam menjaga keberlangsungan hidup keluarga. Dipertegas oleh (Sangha et al., 2020), bahwa dalam komunitas adat terpencil, praktik pengasuhan, distribusi kerja, dan penempatan peran anak dalam kehidupan sosial seringkali bertentangan dengan struktur pendidikan formal negara.

Secara teoritis, situasi tersebut dapat dianalisis melalui kerangka teori struktur dan agensi Giddens (1984) bahwa tindakan orang tua dan anak untuk memilih bekerja daripada bersekolah buka semata-mata keputusan bebas, tetapi hasil interaksi antara struktur ekonomi (kemiskinan) dan budaya (loyalitas keluarga dan norma adat). Sejalan juga dengan teori antropologi Pendidikan (Levinson & Holland, 1996), menjelaskan bahwa Pendidikan formal sering gagal menarik partisipasi Masyarakat adat karena tidak mengakui atau menghargai bentuk pembekajaran local. Sekolah dianggap memisahkan anak dari keluarga, dan justru mengganggu alur kehidupan domestik yang telah tertata secara turun-temurun. Dipertegas temuan Aral (2022), menyatakan bahwa pendekatan pendidikan formal yang tidak kontekstual menyebabkan penolakan kultural secara halus, di mana sekolah dianggap sebagai sesuatu yang "asing", "membuang waktu", atau "tidak sejalan dengan kehidupan nyata."

SIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Hulu Sampanahan menghasilkan beberapa temuan penting, antara lain sebagai berikut:

- a. Kegiatan edukasi dan sosialisasi berhasil terlaksana dengan dukungan aktif pemerintah desa dan partisipasi masyarakat. Kehadiran 35 kepala keluarga dengan tingkat partisipasi penuh menunjukkan komitmen awal komunitas untuk terlibat dalam upaya peningkatan pendidikan.
- b. Rendahnya partisipasi sekolah di Desa Hulu Sampanahan dipengaruhi oleh faktor

- struktural dan kultural yang kompleks, meliputi: (a) jarak ke sekolah menengah yang sangat jauh (33–44 km), (b) kondisi jalan yang rusak berat, (c) ketiadaan layanan pendidikan menengah di desa, (d) rendahnya kesadaran orang tua terhadap nilai strategis pendidikan, dan (e) keterlibatan anak dalam pekerjaan rumah tangga dan ekonomi keluarga.
- c. Edukasi yang dilakukan mampu membuka wawasan masyarakat tentang hak pendidikan, pentingnya pendidikan bagi generasi penerus, serta peluang beasiswa. Hal ini terbukti dari antusiasme peserta: 22 orang (63%) aktif berdiskusi, lebih dari 15 pertanyaan diajukan terkait akses sekolah dan beasiswa, serta beberapa peserta menyatakan baru mengetahui adanya program beasiswa. Indikator tersebut menunjukkan adanya peningkatan kesadaran awal masyarakat terhadap pentingnya pendidikan.
- d. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pemberdayaan berbasis edukasi partisipatif merupakan langkah awal yang strategis untuk membangun kesadaran pendidikan di komunitas adat terpencil. Namun, keberlanjutannya sangat bergantung pada dukungan multi-stakeholder, khususnya pemerintah daerah dan institusi pendidikan, agar transformasi sosial melalui pendidikan dapat tercapai secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lambung Mangkurat sebagai pihak pemberi hibah Program Dosen Wajib Mengabdikan. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada tokoh adat, kepala desa, dan masyarakat Desa Hulu Sampanahan yang telah memberikan dukungan dan fasilitas dalam pelaksanaan pengabdian dosen Program Studi Geografi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. F., Noor, M. I. M., Tedong, P. A., Zaini, A. A., Abd Kadir, N. A., & Abdullah, M. T. (2023). Indigenous parents' perception of the effectiveness of formal education in Malaysia. *Journal of Nusantara Studies (JONUS)*, 8(1), 384–405. <https://doi.org/10.24200/jonus.vol8iss1p384-405>
- Aral, A. E. (2022). Seeing the glass half-empty: implications for safeguarding intangible cultural heritage through formal education in Türkiye. *International Journal of Heritage Studies*, 28(11–12), 1286–1299. <https://doi.org/10.1080/13527258.2022.2153264>
- BPS. (2023). *Kabupaten Kotabaru Dalam Angka 2023*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotabaru.
- Freire, P., & Ramos, M. B. (2009). Chapter 2 from “Pedagogy of the Oppressed.” *Race/Ethnicity: Multidisciplinary Global Contexts*, 2(2), 163–174. <https://www.jstor.org/stable/25595064>
- Gansauer, G., Haggerty, J. H., Smith, K. K., Haggerty, M. N., & Roemer, K. F. (2024). Can infrastructure help ‘left behind’ places ‘catch up?’ Theorizing the role of built infrastructure in regional development. *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*, 17(2), 393–406. <https://doi.org/10.1093/cjres/rsad032>
- Giddens, A. (1984). *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. University of California Press. <https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=x2bf4g9Z6ZwC>
- Hikmawati, N. K. (2022). Community empowerment efforts. *Journal Intellectual Sufism Research (JISR)*, 4(2), 96–103. <https://doi.org/10.52032/jisr.v4i2.110>
- Joseph, R. (2020). The theory of empowerment: A critical analysis with the theory evaluation scale. *Journal of Human Behavior in the Social Environment*, 30(2), 138–157. <https://doi.org/10.1080/10911359.2019.1660294>

- Kearns, R. A., Lewis, N., McCreanor, T., & Witten, K. (2009). 'The status quo is not an option': Community impacts of school closure in South Taranaki, New Zealand. *Journal of Rural Studies*, 25(1), 131–140.
<https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2008.08.002>
- Levinson, B. A., & Holland, D. (1996). The cultural production of the educated person: An introduction. In *The cultural production of the educated person: Critical ethnographies of schooling and local practice* (pp. 1–54). SUNY Press.
<https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=B5CdepxbhScC>
- Massey, D. S., & Denton, N. A. (2012). Segregation and the Making of the Underclass. In *The Urban Sociology Reader* (pp. 206–215). Routledge.
https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=JXfm_pQ4aXQC
- Mingat, A. (2020). *Equity and Access to Education in Developing Countries*. UNESCO International Institute for Educational Planning.
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373669>
- Prasetyo, E., Firdiyani, F., & Machrunnisa, M. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangtengah Dalam Menghadapi Transformasi Digital: Implementasi Smart Village. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(1), 78–92.
<https://doi.org/10.24198/kumawula.v8i1.55037>
- Quilty, S., Jupurrurla, N. F., Bailie, R. S., & Gruen, R. L. (2022). Climate, housing, energy and Indigenous health: a call to action. *The Medical Journal of Australia*, 217(1), 9.
<https://doi.org/10.5694/mja2.51610>
- Sangha, K. K., Duvert, A., Archer, R., & Russell-Smith, J. (2020). Unrealised economic opportunities in remote Indigenous communities: Case studies from northern Australia. *Social Sciences & Humanities Open*, 2(1), 100093.
<https://doi.org/10.1016/J.SSAHO.2020.100093>
- Soja, E. W. (2013). *Seeking Spatial Justice*. University of Minnesota Press.
<https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=NkfEeomy-IUC>
- Sujarwani, R., Wulandari, F. D., Husni, A., & Rianto, F. (2018). Pemberdayaan masyarakat komunitas adat terpencil (KAT) oleh pemerintah kabupaten lingga. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 20(1), 17–31.
<https://doi.org/10.25077/JANTRO.V20.N1.P17-31.2018>
- Sumari, N. S., Tanveer, H., Shao, Z., & Kira, E. S. (2019). Geospatial distribution and accessibility of primary and secondary schools: a case of Abbottabad City, Pakistan. *Proceedings of the ICA*, 2, 1–11.
<https://doi.org/10.5194/ica-proc-2-125-2019>
- Susanto, D., Liliyantje, L., Inriani, E., Netanyahu, K., Raja, D. T. S., Garuda, N., & Ariyani, A. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Lawang Uru Dalam Menghadapi Era Industrialisasi. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 255–267.
<https://doi.org/10.24198/kumawula.v7i1.52915>
- Tomaney, J., Blackman, M., Natarajan, L., Panayotopoulos-Tsiros, D., Sutcliffe-Braithwaite, F., & Taylor, M. (2024). *Social infrastructure and left behind places*. Taylor & Francis.
<https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/102892>
- Yadav, S. K., & Vashishtha, U. C. (2024). Accessibility, Quality, and Significance of Education for Educationally Deprived Children. *Asian Journal of Education and Social Studies*, 50(5), 452–461.
<https://doi.org/10.9734/ajess/2024/v50i51375>
- Zada, H., Shah, N., & Bibi, Z. (2023). Effects of Infrastructure Impediments on Dropout of Female Students: A Cross-Sectional Based Study of District Bajaur Khyber Pakhtunkhwa. *Pakistan Social Sciences Review*, 7(IV).
[https://doi.org/10.35484/pssr.2023\(7-iv\)22](https://doi.org/10.35484/pssr.2023(7-iv)22)
- Zimmerman, M. A. (1995). Psychological empowerment: Issues and illustrations. *American Journal of Community Psychology*, 23(5), 581–599.
<https://doi.org/10.1007/BF02506983>